



Globalisasi, Tantangan Pembangunan Kesadaran Bela Negara bagi Generasi Muda

(Globalization: the Challenge of Building Awareness of Bela Negara Among the Young Generation)

Dartono^{1*}, Budi Santoso²

Teknik Aeronautika Pertahanan, Teknik Elektronika Pertahanan,
dan Teknik Manajemen Industri Pertahanan Akademi Angkatan Udara

E-mail: dartono@aau.ac.id, budi.bodjong@aau.ac.id

Abstract— *Threats to the existence of the state are increasingly complex, but youth awareness of Bela Negara tends to be reactive and stagnate on the orientation of physical threats. The role of family, school, and community as pillars of education is indicated to work by itself. This literature study aims to explain awareness, the influence of dominant factors, and alternative strategies for youth awareness of Bela Negara in the Era of Globalization. Through the application of descriptive-qualitative method the study concludes; (1) The threat to the existence of an increasingly complex state has not been responded to by the understanding of the younger generation in a comprehensive manner. (2) The presence of non-physical threats that are also destructive, such as the understanding of the counter value of Pancasila and local wisdom, the flood of imported products, etc. feels so natural, that most young people don't realize it, (3) Contextualization of understanding through education is the most important element, and material for understanding the counter values of Pancasila and local wisdom, the threat of imported products, etc. as a threat to the existence of the state, it becomes a priority for insertion in education, both in the family, school, and community spheres. The existence of relevant measures and policies is also very much needed to continuously improve the effectiveness of their implementation.*

Keywords— Globalization, Challenge of Building, Awareness of Bela Negara, Young Generation

Abstrak— *Ancaman eksistensi negara kian kompleks, namun kesadaran bela negara kaum muda cenderung reaktif dan stag pada orientasi ancaman fisik. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai pilar pendidikan terindikasi berjalan sendiri-sendiri. Studi literatur ini bertujuan menjelaskan tentang kesadaran, pengaruh faktor dominan, serta alternatif strategi pembangunan bela negara bagi generasi muda di era globalisasi. Melalui penerapan metode deskriptif-kualitatif studi menyimpulkan; (1) Ancaman eksistensi negara yang kian kompleks belum direspon pemahaman generasi muda secara komprehensif. Konsekuensinya kesadaran bela negara mereka pun belum kontekstual, (2) Kehadiran ancaman non fisik yang juga destruktif seperti faham kontra nilai Pancasila dan kearifan lokal, membanjirnya produk import, dll. terasa begitu natural, sehingga kebanyakan generasi muda tidak menyadarinya, (3) Kontekstualisasi pemahaman melalui pendidikan menjadi elemen terpenting, dan materi faham kontra nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal, ancaman produk import, dll. sebagai ancaman atas eksistensi negara menjadi prioritas insersi dalam pendidikan, baik di lingkup keluarga, lingkup sekolah, maupun lingkup masyarakat. Keberadaan langkah dan kebijakan yang relevan juga sangat diperlukan guna terus meningkatkan efektivitas pelaksanaannya.*

Kata Kunci— Globalisasi, Tantangan Membangun, Kesadaran Bela Negara, Generasi Muda

*Korespondensi (Dartono)

E-mail: dartono@aau.ac.id

I. PENDAHULUAN

Memasuki era globalisasi, berbagai peristiwa fenomenal terjadi. Terpecahnya Uni Soviet (1991) boleh jadi paling fenomenal, diikuti Yugoslavia (2001). Beberapa negara lainnya gagal, sebut saja Somalia, Irak dll., serta Venezuela dan Srilanka kini diambang kebangkrutan. Di Eropa, keluarnya Inggris dari Uni Eropa (*Brexit*) juga begitu menyita atensi publik dunia. Sangat sulit memisahkannya dari kepentingan eksternal. Sebab secara geopolitis kepentingan negara-negara atas ruang (*lebensraum*), SDA, dan SDE abadi dan dalam realisasinya kerap tak peduli bahkan kehancuran negara sahabat sekalipun. Bagi Indonesia, “direbutnya” Sipadan dan Ligitan oleh Malaysia (2001) menjadi bukti nyata. Demikian juga AS dan Australia yang di era Perang Dingin (*cold war*) mensponsori integrasi Timor Timur (1976), pasca keruntuhan Uni Soviet, mereka berbalik mendukung pemisahan propinsi yang menjadi negara Timor Leste (1999) itu.

Bergulirnya isu global (demokratisasi, HAM, dll.) positif, akan tetapi implementasinya acap menjadi *entry point* bagi kepentingan asing seperti di Irak era Saddam Hussein misalnya. Berakhirnya Perang Dingin pun tidak serta merta “mendinginkan” situasi. Terorisme yang diawali tragedi WTC (11 September 2001) menjadi isu sekaligus “medan tempur” baru yang tidak kalah berbahaya. Jargon Bush “*war against terrorism*” kian menambah kompleksitas instrumen kepentingan negara besar. Ini menjadi indikasi betapa ancaman tradisional (militer) tetap potensial. Demikian juga kebangkitan militer Tiongkok dan klaim mereka atas LCS yang memicu respon kehadiran militer AS, Inggris, dan Australia, serta berbagai konflik lain seperti Tiongkok-India, Armenia-Azerbaijan, Rusia-Ukraina, dll. kian memperkuat sinyalemen itu.

Globalisasi yang dipacu IT secara masif dan kian eskalatif telah memicu pergeseran metode pendekatan kepentingan negara-negara. Tetap potensial tetapi ada kecenderungan pergeseran metode dari perang konvensional ke arah perang asimetris (*asymmetric warfare*), perang hibrida (*hybrid warfare*), dan perang proksi (*proxy war*). Cakupannya pun kian kompleks, meliputi seluruh aspek kehidupan nasional (ideologi, politik, ekonomi, sosbud, dan hukum). Untuk itu, isu *free trade* dengan instrumennya WTO/AFTA seyogyanya juga diwaspadai sebagai bagian perang proksi. Nurmantyo saat menjabat Panglima TNI kerap mengusung isu perang proksi agar masyarakat bersikap cerdas dan waspada, sebab musuh tak terlihat dan kian sulit diidentifikasi.

Pada sisi lain, kehadiran IT sendiri tentu positif, namun ia juga memacu potensi ancaman menjadi kian destruktif. Faham kontra nilai Pancasila dan kearifan lokal (*local wisdom*), ujaran kebencian (*hate speech*), berita bohong (*hoax*), dan konten bernuansa SARA kian menjadi “menu harian” pengguna internet yang mayoritas generasi muda. Koesoema mencatat, dewasa ini manusia dihadapkan hegemoni media, revolusi Iptek, yang tak hanya melahirkan kemudahan dan perubahan positif, akan tetapi mengundang banyak kekhawatiran. Degradasi kepedulian dan kecintaan kepada negara pun kian nyata. Mengutip catatan Sejarawan Toynbee, “dari 21 peradaban dunia yang tercatat, 19 diantaranya hancur bukan karena penaklukan dari luar, tetapi sebab pembusukan moral dari dalam”, kondisi di atas potensial melanda semua negara termasuk Indonesia. Mustahil untuk mereduksi penggunaan IT, dan untuk ituantisipasi, proteksi, dan motivasi secara berkelanjutan menjadi keharusan, salah satunya melalui pembangunan kesadaran bela negara yang dinilai efektif, termasuk bagi generasi muda.

II. LANDASAN TEORI

A. Kesadaran Bela Negara dan Persepsi Ancaman

UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebut “Bela negara sebagai sikap perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sementara hakikat kesadaran bela negara ialah kesediaan berbakti dan berkorban membela negara. Jadi esensinya ialah kecintaan dan pengorbanan kepada negara. Selaras, John F. Kennedy menyatakan, “jangan kau tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tetapi tanyakan apa yang kau berikan kepada

negara”. Kata kuncinya kontribusi kepada negara, sehingga spektrum implementasi bela negara sangat luas, mulai hal kecil (“sepele”) hingga mengorbankan jiwa raga demi kejayaan negara.

Di AS, Spanyol, Jerman, dan Inggris, bela negara cenderung identik pelatihan militer. Warga negara mengikuti program itu secara individu maupun sebagai anggota resimen seperti Tentara Teritorial Britania Raya misalnya. Namun dalam hal tertentu, milisi di AS dapat menjadi bagian pasukan cadangan militer seperti *US National Guard*. Demikian juga di Taiwan, Korea, dan Israel, warga negara wajib beberapa tahun memasuki dan menyelesaikan dinas nasional. Di Indonesia, konsep bela negara tidak terpisahkan dari konteks perjuangan melawan penjajah. Penetapan Hari Bela Negara (19 Desember) sendiri bertepatan pembentukan PDRI di Bukittinggi, sebagai respon atas pendudukan Ibukota Yogyakarta oleh Belanda (Agresi Militer II, 19 Desember 1948). Logis bela negara dipahami identik perjuangan fisik kontra ancaman militer.

Seiring mengemuka isu HAM, banyak spekulasi bahwa perang konvensional kian menjadi pilihan terakhir dalam penyelesaian konflik antar negara. Namun di paruh pertama abad 21, realitas justru sebaliknya. Konflik India-Tiongkok, Armenia-Azerbaijan, Rusia-Ukraina, dll., di samping konflik yang masih berkecamuk, seakan menepis spekulasi di atas. Agresivitas Tiongkok dalam membangun kekuatan tempur serta klaim atas LCS kian menguatkan catatan betapa perang tampak telah menjadi tradisi mempertahankan diri dalam relasi antar-manusia dan antar-bangsa, meskipun kekalahan tidak identik petaka eksistensi negara-bangsa.

Di sisi lain perang proksi sebagai cara paling efisien juga kian menjadi pilihan. Nuansa kepentingan asing dalam pemberontakan di Indonesia, serta upaya mengubah *mindset* melalui internalisasi faham kontra nilai Pancasila dan kearifan lokal (materialisme, individualisme, liberalisme, radikalisme, Komunisme dll.) serta gaya hidup (*life style*) *western* yang hedon patut diwaspadai bagian *proxy war*. Dipacu eskalativitas perkembangan IT, kondisi tersebut kian sulit diatasi. Implikasinya, kepedulian generasi muda atas negara pun kian terus terdegradasi.

B. *Globalisasi*

Menurut KBBI globalisasi ialah proses masuknya ke ruang lingkup dunia, salah satu kata kunci untuk mendefinisi situasi dunia saat ini. Secara sosiologis, globalisasi acap digunakan untuk menjelaskan keadaan dunia yang tanpa batas, atau proses kian menyatunya penduduk bumi tanpa terhalang batas-batas geografis. Secara penuh curiga, globalisasi juga dimaknai proyek negara-negara adikuasa (identik kapitalisme termutakhir) guna mengatur ekonomi dunia, negara-negara kecil dan lemah kian tidak berdaya sebab tidak mampu bersaing. Ia sangat mempengaruhi ekonomi dunia, budaya, dan agama. Indikasinya antara lain (1) komunikasi global dan interaksi kultural kian cepat seiring perkembangan media seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet, sementara pergerakan massa seperti turisme memungkinkan orang merasakan banyak hal dari budaya berbeda, (2) Pasar dan produksi ekonomi negara-negara kian saling tergantung sebagai konsekuensi perdagangan global, pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi (WTO). Kennedy dan Cohen menyimpulkan, transformasi ini telah membawa manusia pada sebuah kesadaran dan pemahaman baru bahwa dunia adalah satu.

C. *Internalisasi Nilai dan Peran Pendidikan*

Gordon Allport (Kuperman, 1983) menyebut nilai sebagai keyakinan seseorang untuk bertindak atas dasar pilihannya, menjadi patokan normatif yang memengaruhi manusia dalam menentukan pilihan tindakan alternatif. Menurut Elias, ada tiga klasifikasi teori pendidikan nilai yaitu pendekatan kognitif, afektif, dan perilaku. Demikian juga Rest mengklasifikasi tiga unsur moral yaitu perilaku, kognisi, dan afeksi. Dalam hal ini Hill dalam Adisusilo (2013) menjelaskan, “sebagai acuan perilaku, nilai meliputi tiga tahapan yaitu nilai yang dipikirkan (*value thinking* atau *value cognitive*), nilai sebagai kepercayaan, keyakinan, atau niat untuk melakukan sesuatu (*value affective*), dan nilai yang telah mewujudkan menjadi tindakan nyata (*value action*), yaitu nilai keyakinan yang menjadi acuan dalam bersikap-perilaku sesuai moralitas dalam masyarakat”. Nilai harus membuat manusia mampu menguasai pengetahuan yang berakar nilai-nilai tradisionalnya guna merespon nilai-nilai modern; memiliki empati dengan

persepsi dan perasaan orang-orang tradisional; mengembangkan keterampilan kritis dan menghargai nilai-nilai; mengembangkan diri agar terampil membuat keputusan dan berdialog dengan sesama; dan akhirnya mampu mendorong manusia berkomitmen kepada masyarakat dan warganya. Pendidikan nilai tidak sekadar ditambahkan, tetapi hakiki dalam seluruh proses pendidikan di lembaga sosial terutama keluarga. Pendidikan nilai tak serta merta terjadi pada diri seseorang, tetapi prosesusal, dimana tujuan pendidikan nilai terlihat hanya jika setiap tahapan pendidikan nilai terlampaui.

Tri Pusat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara menekankan peran strategis tiga pilar pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Demikian juga Langeveld dalam Tirtahardjha menyebut bahwa keluarga, sekolah, dan masyarakat bertanggung jawab atas pendidikan. Ini Relevan, Phillips menyatakan bahwa pendidikan karakter harus melibatkan semua pihak; rumah tangga (keluarga); sekolah; dan lingkungan lebih luas (masyarakat). Sebab itu, langkah pertama ialah menyambung kembali relasi (*educational networks*) yang nyaris terputus antara ketiganya. Sebab pendidikan karakter tidak akan berhasil selama antara ketiga lingkungan pendidikan tidak ada kesinambungan dan harmonisasi.

Nyaris mustahil pendidikan nilai tanpa memerankan keluarga (orang tua). Ia menjadi tempat sosialisasi peradaban bagi anak-anak dan banyak hal seperti nilai-nilai sosial, tradisi, keterampilan, prinsip, dan pola perilaku di segala aspek. Mutlak baginya menjadi pendidik dan pemberi nilai-nilai budaya mendasar bagi kehidupan anak. Keluarga harus membekali anak-anak mereka dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dalam catatan Melly Latifah, keluarga adalah pusat, pertama, dan terpenting, sebab keberhasilan mendidik di dalam keluarga akan memuluskan pendidikan selanjutnya. Gagal mendidik di dalam keluarga akan menyulitkan lembaga lain (selain keluarga) memperbaiki kegagalan itu.

Berikutnya sekolah bukan sekadar menjadi tempat *transfer of knowledge*. Menurut Fraenkel (1977), sekolah tidak semata tempat guru menyampaikan pengetahuan melalui berbagai mata pelajaran, tetapi juga menjadi lembaga yang mengupayakan dan proses pembelajaran berorientasi nilai (*value-oriented enterprise*). Pembentukan karakter sebagai bagian pendidikan nilai (*values education*) melalui sekolah merupakan usaha mulia yang mendesak dilakukan. Bahkan, terkait masa depan, sekolah bertanggungjawab bukan hanya dalam mencetak peserta didik yang unggul dalam iptek, akan tetapi juga dalam jati diri, karakter dan kepribadian.

Sementara pendidikan lingkup masyarakat, menurut Shofwan dapat menjadi pengganti, pelengkap, sekaligus penambah, dan mungkin pengembang pendidikan keluarga dan sekolah. Sesuai konsep Tri Pusat Pendidikan, konsep Wriggins pemimpin sebagai personifikasi bangsa memiliki peran signifikan bagi peningkatan integrasi nasional. Demikian juga lembaga politik dan administrasi seperti birokrasi, tentara, media, parpol, dan legislatif dalam menciptakan identitas bangsa mutlak menjembatani konflik untuk kepentingan bersama, dapat dikategori masyarakat. Menurut Shihab, situasi kemasyarakatan dengan sistem nilai yang dianutnya, mempengaruhi sikap dan cara pandang mereka secara keseluruhan.

III. GENERASI MUDA DAN DAMPAK NEGATIF IT

Definisi generasi muda kerap lebih bersifat teknis, misal berbasis usia. Menurut WHO, generasi muda atau pemuda (*young people*) meliputi batasan usia 10-24 tahun, sementara menurut *International Youth Year* (1985), usianya 15-24 tahun. Generasi muda juga dapat dimaknai kelompok individu berkarakter dinamis, bergejolak, dan optimistis, tetapi belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Jadi generasi muda kini identik Generasi Z (Gen Z), lahir tahun 1996-2012. Anak-anak usia 9-26 tahun kini termasuk Gen Z yang juga disebut *iGeneration* yang familiar internet dan teknologi. Mereka terlahir di saat publik tengah beradaptasi penuh dengan IT, sehingga mayoritas sangat bergantung gawai (*smartphone*) (Kontan.co.id, 2020). Gen Z memiliki kelebihan diantaranya berpengetahuan luas sebab mudah akses informasi, terbuka, dan lebih toleran. Sementara kelemahannya antara lain cenderung individual dan egosentris, kurang menghargai proses (serba instan), memprioritaskan uang, dan emosi cenderung labil.

Sejalan, John Naisbitt dan Aburdene (1990) memprediksi, menjelang akhir abad XX, akan terjadi kecenderungan perubahan besar di dunia. Perubahan secara bertahap baik dibidang sosial, ekonomi, maupun politik akan mempengaruhi dunia. Sasaran utamanya mencapai visi dan misi globalisasi barat di negara berkembang yaitu generasi muda, sebab pada usia inilah emosi seseorang masih labil, mulai mencari jati diri yang sebenarnya, sehingga paling rentan terhadap pengaruh globalisasi barat. Arus globalisasi yang kian deras yang dihadapi oleh generasi muda memerlukan alat yang kuat sebagai filter, salah satunya yaitu karakter yang kuat. Dengan karakter generasi muda bisa menyaring kebudayaan baru yang dibawa globalisasi.

Selanjutnya survei *Alvara Research Center* Juni 2022 menunjukkan, Gen Z Indonesia “gila” internet. Logis bila dampak negatifnya juga dominan pada mereka. Penetrasinya meningkat seiring usia muda suatu generasi. Penelitian perubahan perilaku generasi muda terkait penggunaan medsos belum banyak dielaborasi. Kajian Nurriszka (2016) misalnya mengelaborasi perubahan perilaku pada pola interaksi, aspek bahasa, dan gaya berpakaian yang didominasi budaya barat akibat pengaruh medsos. Kemudian Saleh dan Pitriani (2018) menunjukkan perubahan perilaku akibat medsos telah membentuk budaya *Alone Together* (acuh terhadap aktivitas sekitar) remaja, termasuk perubahan perilaku belajar siswa akibat pengaruh medsos (Agustiah, Fauzi dan Ramadhani, 2020). Data hasil survei terlihat pada tabel 1.

TABEL I
KODE NMEA DAN PENJELASANNYA

No	Generasi	Akses Internet (%)	Addicted (%)	Durasi Jam/Hari (%)		
				7-10	11-13	>13
1	Z	97,7	34,0	20,9	5,1	8,0
	Milenial	90,4	20,4	13,7	3,0	3,7
2	X	75,9	12,1	7,1	2,4	2,6
3	<i>Baby Boomers</i>	48,5.	-	-	-	-

Dekan FPsi UMB, M. Iqbal mencatat, tanpa disadari, gadget dan medsos mengubah banyak penggunaannya menjadi manusia manipulatif. Generasi muda mulai meninggalkan karakter bangsa, bahkan sangat bergantung *trend* digital termasuk medsos. Kemajuan teknologi telah menjadikan generasi muda cerdas secara kognitif akan tetapi lemah secara afektif. Dalam keseharian, mem-*bully*, menghina terang-terangan di media sosial, peri-laku kekerasan hingga seksual menyimpang tak lagi tabu ataupun malu diperlihatkan. Lebih lanjut kajian Rusnali (2020) menunjukkan bahwa medsos dapat menyebabkan terjadinya dekadensi moral generasi muda. Beberapa contoh perilaku negatif dapat terlihat misalnya BNN Ungkap Penggunaan Narkoba Meningkat di Kalangan Remaja hingga Mahasiswa. Polres Metro Bekasi Kota juga mencatat 35 geng motor yang mayoritas anggotanya pelajar di wilayah Kota Bekasi, dll.

Degradasi karakter telah lama terjadi. Bung Karno menyatakan, “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri”. Dua hal tersirat, *pertama*, banyak ancaman muncul dari dalam negeri, dan walaupun dari luar, ada peran “agen internal” (*proxy*). Aksi internal seperti RMS (1950), PRRI/Permesta (1957), Timtim (1999) dan OPM merupakan fakta nyata. Demikian pula aksi ideologis seperti DI/TII dan PKI (1948 dan 1965). Tertembaknya pesawat B-26 Allen Pope (AS) oleh LU Ig. Dewanto (18 Mei 1958) menjadi satu fakta tak terbantahkan. *Kedua*, banyak warga negara alih-alih berkorban, mereka justru merusak dan menghancurkan negara. Mochtar Lubis (1977) dalam *Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungjawaban* mencatat bahwa orang Indonesia memiliki ciri munafik, enggan tanggung jawab dll. Serupa, Eep Saepulloh Fattah (1997) menerbitkan buku, *Bangsaku yang Menyebalkan*, dan penyair Taufiq Ismail (1998) dalam kumpulan puisi, *Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia*. Hajati dan Yani menguraikan sifat munafik (hipokrit) misalnya, dimaknai berpura-pura, lain dimuka lain di belakang. Ciri ini masih meng-gejala, salah satunya terkait kasus korupsi. Kita semua mengutuk korupsi, tetapi terus saja melakukan korupsi dan dari hari kehari bertambah saja. Di keseharian merasa jengkel atas perilaku biang kemacetan, akan tetapi menjadi bagian darinya, berdiskusi tentang urgensi memakai produk lokal dalam balutan produk impor dll. Azra mencatat, dalam masa tiga tahun era reformasi, Indonesia tak hanya gagal mengatasi krisis ekonomi dan politik, akan tetapi lebih mengerikan

lagi, berada dalam disintegrasi sosial dan politik secara vertikal maupun horizontal. Tak heran bila mayoritas responden *The Jakarta Post* (20 Mei 2001) menyatakan tidak lagi memiliki kebanggaan sebagai orang Indonesia (*having no pride as Indonesians*). Saat ini?

Fenomena di atas potensial menjadi ancaman eksistensi negara yang kian nyata. Lickona (Agus, 2012) mencatat 10 karakter tanda kehancuran suatu negara yaitu (1) meningkatnya kekerasan di kalangan remaja; (2) penggunaan bahasa dan kata-kata buruk; (3) pengaruh *peer group* yang kuat dalam tindak kekerasan; (4) meningkatnya perilaku merusak diri: narkoba, seks bebas, dll.; (5) pedoman moral baik dan buruk makin kabur; (6) etos kerja menurun; (7) rasa hormat orang tua dan guru makin rendah; (8) rasa tanggung jawab individu dan warga negara makin rendah; (9) ketidakjujuran makin membudaya; serta (10) rasa saling curiga dan kebencian antara sesama.” Akankah kita jerumuskan Indonesia menjadi bagian “dari 21 peradaban dunia yang tercatat, 19 diantaranya hancur bukan karena penaklukan dari luar, akan tetapi karena pembusukan moral dari dalam” sebagaimana catatan Toynbee?

IV. MEMBANGUN KESADARAN GENERASI MUDA: SEBUAH ALTERNATIF

A. Pemuda dan Eksistensi Negara

Tak ada keraguan atas kiprah pemuda. Bung Karno menyiratkannya, “beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kuceraht semeru dari akarnya, beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncang dunia”. Pembentukan Boedi Oetomo (1908), tonggak kebangkitan nasional adalah fakta konkret. Bahkan dapat dikatakan menginspirasi pendirian organisasi pergerakan lainnya seperti Sarekat Islam (1912), Muhammadiyah (1912), *Indische Social Democratische Vereeniging* (1914) embrio PKI, *Indische Partij*, Perhimpunan Indonesia (1925), PNI (1927), dll.

Pasca Boedi Oetomo, dibentuk berbagai organisasi dengan identitas sosio-kultural daerah dan organisasi pemuda kedaerahan (kesukuan) seperti Jong Batak, Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islaminten Bond, Pemuda Kaum Betawi, Pemuda Pelajar-Pelajar Indonesia dll. Untuk menyatukan, dibentuk Perhimpunan-Perhimpunan Pelajar Indonesia (1926). Selanjutnya diadakan Kongres Pemuda 1 (30 April 1926) di Jakarta, dihadiri wakil Jong Java, Jong Sumatra, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islamieten Bond, *Studerenden Minahasaers*, Jong Batak, dan Pemuda Kaum Theosofi. Kongres Pemuda 2 (27-28 Oktober 1928) yang melahirkan ikrar Sumpah Pemuda boleh jadi merupakan kiprah paling monumental sebab ia membuat generasi muda lebih mencintai bangsanya, sekaligus gambaran semangat dan rasa bangga atas Indonesia. Kiprah pemuda juga terlihat saat jelang Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. “Penculikan” Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok (16 Agustus 1945) telah mendesak keduanya untuk memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Upaya Sekutu mengambil alih wilayah eks jajahan Jepang pasca proklamasi, tentu memancing reaksi perlawanan termasuk oleh pemuda. Pertempuran pecah di banyak kota (wilayah) seperti Pertempuran Medan Area di Sumatra Utara (13 Oktober 1945), dimana barisan pemuda bersama TKR bertempur melawan Sekutu dan NICA dalam merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan eks Jepang. Demikian juga pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, Ambarawa 20 November hingga 15 Desember 1945, Bandung Lautan Api 23 Maret 1946, Puputan Margarana di Bali 20 November 1946, dll.

Januari-Maret 1966, selama 60 hari, dipelopori mahasiswa UI melalui Tritura, aksi mahasiswa telah memaksa pemerintah membubarkan PKI. Pengabaian kepentingan rakyat oleh Rezim Orba mendorong ribuan mahasiswa yang dipimpin Ketua Dema UI (Hariman Siregar), menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah tempat di Jakarta. Mereka menolak investasi asing yang berpotensi membuka celah korupsi di pemerintahan, serta berdampak negatif bagi lingkungan dan HAM. Apel Tritura 1974 memaklumkan tuntutan penurunan harga bahan pokok, pembubaran lembaga asisten presiden (aspri), dan penegakan hukum terhadap para koruptor. Namun itu menjadi malapetaka dan dikenal "Malapetaka 15 Januari 1974" (Malari). Tercatat 11 meninggal, 300 luka-luka, 775 ditahan, 807 mobil dan 187 sepeda motor dibakar, 144 bangunan rusak, serta 160 kg emas hilang dari sejumlah toko perhiasan. Sikap serupa juga terlihat di era

1998 dimana pemuda kembali menuntut perubahan atas Rezim Orba yang telah berkuasa 32 tahun. Betapa kiprah pemuda telah terbukti di setiap zaman, mulai kebangkitan nasional, kemerdekaan, revolusi, hingga era reformasi. Dapat dikatakan kemajuan ataupun kehancuran suatu negara ditentukan oleh pemuda sebagai agen perubahan (*agent of change*).

Arus globalisasi berdampak tantangan pembangunan kesadaran bela negara kian kompleks. John Naisbitt dalam *Global Paradox* (1995) mencatat, kian universal tindakan kita kian kesukuan, berfikir lokal, bertindak global. Kita fokus pada hal-hal yang etnik yang hanya dimiliki kelompok/masyarakat itu sendiri sebagai modal pengembangan ke dunia internasional. Demikian juga Ohmae dalam *the Borderless World* di mana negara kian tak berdaya mengontrol arus modal asing dan konsumen lokal yang kian liberal. Betapa kebijakan negara-negara besar terlihat begitu populis tetapi dalam praktik sangat protektif. Tuntutan penerapan *global issues* seperti nuklir, demokratisasi, HAM, terorisme dll. adalah fakta tak terbantahkan. Demikian juga *free trade* dengan instrumennya *WTO* (global) dan *AFTA* (regional).

Tumbuh kembang TIK yang eskalatif juga kian mendegradasi jati diri generasi muda. Ujaran kebencian (*hate speech*), *hoax*, dan konten bernuansa SARA kian menjadi “menu harian” pengguna medsos yang mayoritas generasi muda. Dalam dunia maya, betapa polarisasi anak bangsa telah berada di level sangat mengawatirkan. Demikian juga faham-faham kontra nilai Pancasila dan kearifan lokal (Materialisme, Liberalisme, Komunisme, Radikalisme, Terorisme, Etnosentrisme, dll.), ataupun gaya hidup hedon dan *western* melalui *food, fashion, and fun* yang kian menjadi *trend*, kian mendegradasi kecintaan tanah air generasi muda.

B. Pengaruh Faktor Dominan

Peran pendidikan nilai yang secara sosiologis merupakan domain keluarga (orang tua) sejauh ini dipandang belum efektif. Peningkatan aktivitas para ibu telah mendegradasi peran itu. Kajian Kusumawati, “Peran Ganda Perempuan Pemetik Teh”, serta Nurmila dan Ratnawati, “Analisis Perhatian Wanita Karir terhadap Keberhasilan Anak dalam Keluarga di Dusun Sawagi Kecamatan Patallassang Kabupaten Gowa” menunjukkannya. Ada tendensi “pemasrahan” peran itu kepada sekolah (guru), namun banyak dari mereka resisten saat guru mengambil peran itu, seperti menghukum untuk mendidik. Sikap, tindakan negatif hingga pelaporan kepada aparat harus diterima para guru. Harian *Republika* mencatat, “tidak sedikit orang tua marah saat anaknya dihukum oleh guru terlebih bila hukumannya tidak sesuai kebiasaan keluarga. Misal, anak mendapat hukuman fisik, seperti dijewer, dibentak, atau disindir dengan kata-kata kasar. Logis bila kemudian para guru pun cenderung bersikap masa bodoh, dan pola relasi yang terbangun antara guru-siswa pada akhirnya cenderung sekadar “transaksional”.

Banyak orang tua ber-“wajah” kontras. Anak-anak, sejak dini mereka difasilitasi sepeda motor atau *handphone* berfitur canggih misalnya, serta memanjakan mereka dengan berbagai properti import berharga mahal. Sukardi pun mencatat, kondisi keluarga sebagai lembaga sosial yang sangat mempengaruhi cita-cita suatu bangsa, memiliki tugas menanamkan nilai dan moral yang berlaku di masyarakat sedini mungkin kepada anak sangat memprihatinkan. Sebagian keluarga kurang memperhatikan nilai-nilai moral dalam setiap perbuatan mereka, bahkan mayoritas keluarga di kota-kota besar telah melakukan tindak penyimpangan.

Kondisi masyarakat sebagai kanchah bagi setiap individu untuk mengembangkan potensi diri, membentuk watak (karakter), serta pengganti, pelengkap, penambah, bahkan pengembang pendidikan keluarga dan sekolah pun telah bergeser. Purwaningsih mencatatnya, degradasi moral telah melanda semua kalangan masyarakat, anak-anak hingga dewasa dan telah memasuki semua lembaga sosial-masyarakat. Tentu ini menjadi masalah serius. Hadis dan Nurhayati, melihat merosotnya mutu pendidikan ialah kurang memaksimalkan komunikasi dan informasi di dunia pendidikan termasuk menjalin relasi yang baik dengan masyarakat. Quraish Shihab menyatakan, peran masyarakat dalam pendidikan terkait erat dengan perubahan cara pandang mereka terhadap pendidikan. Tentu bukan hal mudah, akan tetapi bila tidak dimulai dari sekarang, rasa memiliki, kepedulian, keterlibatan, dan peran aktif masyarakat dengan tingkatan maksimal dapat diperoleh dunia pendidikan? Dengan demikian menjadi keharusan bagi keluarga (orang tua) dan masyarakat untuk memahami nilai-nilai yang akan diajarkan. Notonagoro (dalam Atmaji dan Setyaningsih) mengajukan empat langkah dan sebagai langkah

pertama, pendidik terlebih dahulu harus memahami nilai-nilai apa saja yang diajarkan tentang yang tersembunyi dibalik setiap studi atau nilai-nilai kemanusiaan lainnya.

Seiring perkembangan IT, krisis keteladanan juga potensial menggiring generasi muda mengadopsi bahkan menduplikasi konten IT. Kajian Casaló, Flavián, dan Ibáñez-Sánchez (2020), Arianto dan Risdiyanto (2021), dan Athaya (2021) misalnya menunjukkan penyebab perubahan perilaku negatif generasi muda ialah keberadaan “figur panutan” sebagai idola kaum muda. Figur ini bisa berupa akun-akun *influencer* yang berpengaruh cukup dominan di medsos. Aktivitas “figur” akan selalu dipantau pengikut (*followers*) yang notabene generasi muda. Kebiasaan ini dapat memberikan dampak timbal balik, dan generasi muda akan menduplikasi (meniru) apa yang dilakukan “figur panutan”, sehingga dapat berdampak positif sekaligus dampak negatif pada generasi muda, terlebih bila mereka tidak mampu melakukan verifikasi maupun berfikir secara rasional dalam menyikapi aktivitas “figur panutan” di medsos

C. Membangun Kesadaran Bela Negara Generasi Muda: Sebuah Strategi

Cukup tersedia kajian tentang gagasan, opini, ataupun teori terkait kesadaran bela negara, termasuk bagi kaum muda. Konsep Wriggins misalnya, lebih mengarah pada kesatuan bangsa (nasionalisme) dan pembangunan nasional, akan tetapi cukup relevan mengingat bela negara merupakan indikator sekaligus wujud implementasi nasionalisme. Sebagaimana Wriggins, beberapa strategi atau metode dapat diterapkan termasuk bagi kalangan generasi muda.

1. Persepsi Ancaman

Secara historis-empirik, keberadaan ancaman (musuh) bersama telah mendorong tumbuh kembang semangat bela negara generasi muda. Kelahiran Boedi Oetomo (1908), diikuti pendirian organisasi lainnya, Sumpah Pemuda (1928), Proklamasi 17 Agustus 1945, hingga Perang Kemerdekaan (1945-1949) menjadi fakta konkret. Demikian juga pembentukan Negara Federasi Malaysia (1962) yang telah membangkitkan semangat “Ganyang Malaysia” dan terus bergema hingga kejadian ataupun *event* tertentu.

Banyak hal positif, akan tetapi dampak negatif globalisasi dan IT juga amat kompleks. Faham kontra nilai Pancasila dan kearifan lokal, konten bernuansa SARA dll. menjadi ancaman yang kian nyata. Untuk itu faham ataupun konten itu kiranya dapat diadaptasi sebagai ancaman (musuh) bersama. Ini penting guna mendorong kesadaran serta kewaspadaan generasi muda akan dampak negatif globalisasi dimana spektrum ancaman atas eksistensi negara tidak lagi sebatas fisik, akan tetapi meliputi konteks yang luas.

Di bidang ekonomi, lingkungan, dan HAM kesadaran bela negara antara lain tampak pada peristiwa Malari (1974) dimana mahasiswa menolak masuknya investasi asing yang potensial membuka celah korupsi serta berdampak buruk bagi lingkungan dan HAM. Penerbitan UU Nomor 1 tahun 1967 tentang PMA dipandang tidak mempertimbangkan dampak kerusakan alam dan pelanggaran HAM. Dengan esensi sama, membanjirnya produk impor sebagai konsekuensi perdagangan bebas (*free trade*) potensial menggusur produk lokal dan UKM seyogyanya juga diadaptasi menjadi ancaman (musuh) bersama. Kehancuran industri lokal dan UKM akan berbuah pengangguran dan akhirnya menjadi ancaman eksistensi negara.

2. Pemimpin sebagai Personifikasi Bangsa

Di samping kompetensi kepemimpinan (*leadership*), penempatan diri sebagai personifikasi bangsa sebagaimana Wriggins juga mutlak. Ia milik serta mengayomi semua, sehingga sikap perilaku dan kebijakannya harus populis meliputi seluruh entitas. Satu catatan pemimpin harus selalu menampilkan keteladanan, media efektif dimana Ki Hadjar Dewantara telah menekankan dalam konsep *ing ngarsa sung tuladha*. Berikutnya ialah *ing madya mangun karsa*, dimana pemimpin harus menginspirasi serta menyiapkan staf agar tanpa kehadirannya, organisasi tetap dapat berjalan dengan baik. Spektrum keteladanan pemimpin dalam hal bela negara seyogyanya diperluas meliputi seluruh elemen yang selayaknya menjadi teladan termasuk *public figure* seperti artis, *vlogger*, guru, dosen, dll. yang menjadi *role models* perilaku generasi muda, seyogyanya selalu menampilkan sikap perilaku keteladanan. Untuk itu upaya internalisasi yang didukung kebijakan pemerintah yang relevan dan berkelanjutan mutlak diterapkan.

3. Peran Pendidikan

Cukup indikasi, kompleksitas ancaman yang menyertai era globalisasi belum dipersepsi secara memadai. Konsekuensinya, implementasi bela negara juga masih cenderung berorientasi fisik. Menjadi domain negara untuk menginisiasi serta memfasilitasi edukasi masyarakat terlebih generasi muda tentang *era Globalisasi* dengan berbagai permasalahan di dalamnya. Seiring dinamika ancaman yang kian kompleks, pendidikan menjadi elemen terpenting dalam penguatan kesadaran bela negara bagi generasi muda. Menurut Fudyartanta (1990) dalam *Ketamansiswaan*, sesuai konsep Tri Pusat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara, ada tiga penanggung jawab pendidikan yaitu keluarga, perguruan (sekolah), dan masyarakat (pemuda) yang saling mempengaruhi dan untuk itu harus sinergis untuk mencapai cita-cita pendidikan.

Dalam perspektif Hill, nilai bela negara dengan orientasi ancaman fisik (militer) sebagai acuan dalam berperilaku telah melampaui tahapan persepsi (*value thinking* atau *value cognitive*), keyakinan (*value affective*), dan tindakan (*value action*). Sementara berbagai ancaman yang begitu aktual seperti membanjirnya produk import yang juga tak kalah destruktif bahkan lebih permanen, di mana presiden Jokowi meresponnya dengan menggaungkan jargon “benci produk asing” baru-baru ini misalnya, minim respon. Demikian juga keberadaan berbagai paham kontra nilai Pancasila (materialisme, individualisme, liberalisme, komunisme, terorisme, dll.), serta gaya hidup (*life style*) western yang hedon yang kian menjadi *trend* dalam masyarakat. Ini indikasi bahwa tahapan *value thinking* dan *value affective* atas berbagai fenomena tersebut sebagai ancaman (musuh) bersama setidaknya belum terlampaui. Kesadaran bela negara pun cenderung stag pada orientasi ancaman tradisional (fisik) yang cenderung sporadis-insidental. Kesadaran demikian tidak permanen, reaktif, dan sesaat (*temporary*).

a. Keluarga.

Keluarga (orang tua) memiliki peran strategis dalam tumbuh-kembang kesadaran bela negara terlebih bagi kaum muda. Dekan F-Psi UMB M. Iqbal menyatakan, “penguatan karakter kebangsaan dan akhlak yang baik mutlak dilakukan sejak dini dan ditekankan sejak di lingkungan keluarga. Jangan sampai kemajuan teknologi *handphone* pintar, manusianya bodoh, *smart-phone, dump-people*”. Lebih jauh Latifah mencatat, keberhasilan pendidikan di keluarga akan memuluskan pendidikan lingkup selanjutnya. Sebaliknya, kegagalan di keluarga akan menyulitkan institusi lain di luar keluarga untuk memperbaiki kegagalan itu. Untuk itu keluarga tidak dapat dipisahkan dari konteks penguatan kesadaran bela negara bagi generasi muda.

Seiring dinamika ancaman yang kompleks di era globalisasi, keluarga seyogyanya lebih meningkatkan perannya dalam penguatan kesadaran bela negara. Dalam hal ini penyediaan fasilitas gadget bagi putera-puteri mereka seyogyanya diiringi edukasi pemahaman atas berbagai potensi dampak negatif yang menyertainya seperti paham-paham kontra nilai Pancasila dan kearifan lokal seperti telah terurai di atas. Demikian juga membanjirnya produk impor, keluarga tidak cukup memberikan edukasi, tetapi juga melakukan interlalisasi dengan memprioritaskan penggunaan produk lokal bagi putera-puteri mereka.

b. Sekolah.

Banyak pihak menilai, sekolah belum efektif dalam membangun kesadaran bela negara. Catatan Russell dan Ratna misalnya menyebut bahwa mata ajaran Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) relatif masih sebatas teori. Oleh sebab itu revitalisasi sebagai media pengembangan pendidikan karakter bangsa serta pembangunan kecerdasan akhlak dan kepribadian peserta didik secara utuh sesuai tujuan pendidikan nasional sangat diperlukan. Dalam konteks ini, kontinuitas dan konsistensi materi khususnya terkait kompleksitas ancaman di era globalisasi dan perkembangan IT dengan berbagai dampak negatif yang menyertai seperti paham-paham kontra nilai Pancasila dan kearifan lokal seyogyanya diinsersi di semua jenjang pendidikan (SD - PT). Demikian juga membanjirnya produk impor (asing), insersi sebagai materi pembelajaran mutlak diiringi upaya internalisasi secara berlanjut melalui penggunaan produk lokal secara nyata oleh semua *stakeholders* di lembaga pendidikan seperti, peserta didik, tenaga kependidikan, terlebih pendidik. Tak kalah penting juga materi Sejarah Perjuangan Bangsa sebagai materi wajib secara memadai. Harapannya, generasi muda tidak mudah

tercerabut dari jati diri sebagai bangsa pejuang yang cinta tanah air dan rela berkorban. Dalam konteks ini Bung Karno pernah berkata, "Jasmerah", Jangan sekali-kali melupakan sejarah!

c. Masyarakat.

Masyarakat merupakan wadah bagi warga dalam beraktivitas dan beraktualisasi serta tempat berlatih membentuk karakter (watak). Ia dapat menjadi pengganti, pelengkap, serta penambah, bahkan mungkin pengembangan pendidikan lingkup keluarga dan sekolah. Pada sisi lain Purwaningsih mencatat bahwa degradasi moral telah melanda semua kalangan, anak-anak, dewasa, bahkan telah memasuki semua lembaga sosial-masyarakat. Tentu ini tentu menjadi persoalan yang kompleks. Menurut Hadis dan Nurhayati, salah satu sebab merosotnya mutu pendidikan ialah kurang memaksimalkan komunikasi dan informasi dalam dunia pendidikan termasuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Sementara menurut Quraish Shihab, peran masyarakat dalam pendidikan terkait erat dengan perubahan cara pandang mereka terhadap pendidikan. Sebagai pendidik anak-anak, mutlak bagi masyarakat termasuk sebagai orang tua untuk memahami nilai-nilai yang akan mereka ajarkan. Notonagoro dalam Atmaji dan Setiyaningsih mengajukan empat langkah yang harus ditempuh, dan sebagai langkah pertama, pendidik terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami nilai-nilai apa saja yang diajarkan, tentang yang tersembunyi dibalik setiap studi ataupun nilai-nilai kemanusiaan lainnya. Oleh sebab itu penerbitan Perda Nomor 1 Tahun 2022 Provinsi DIY tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat menjadi *raw model* terkait pembangunan kesadaran bela negara termasuk bagi generasi muda. Sosialisasi kepada minoritas kreatif (*creative minority*) yang dikemas dalam program Sinau Pancasila cukup relevan. Namun seyogyanya ini dapat terus ditingkatkan agar dapat mewujudkan kesadaran bela negara secara maksimal.

4. Perluasan Kesempatan dan Pembangunan Kesejahteraan Bersama

Kesejahteraan secara timbal balik memiliki korelasi dengan tekad bela negara. Kaum pemberontak (RMS, PRRI/Permesta, GAM, OPM, dll.) alih-alih berkorban, mereka justru melempar isu kesejahteraan guna membangun opini publik. Banyak yang telah pemerintah upayakan, namun hingga kini, kesenjangan ekonomi masih demikian terasa. Hasil survei lembaga keuangan Swiss, *Credit Suisse* tahun 2017 misalnya menempatkan gini ratio Indonesia pada peringkat ke-4 di dunia. Menurut data BPS, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan rasio gini sebesar 0,384 pada Maret 2022 (naik 0,003 poin dibandingkan rasio gini September 2021). Pada sisi lain, digitalisasi dan otomatisasi industri sangat potensial berimplikasi PHK masif. Artinya kesadaran bela negara dalam bentuk fanatisme terlebih militansi untuk menggunakan produk lokal setidaknya dapat menjadi solusi.

V. KESIMPULAN

Ancaman atas eksistensi negara yang kian kompleks di era globalisasi, belum memantik respon pemahaman secara komprehensif termasuk di kalangan generasi muda. Proses internalisasi berbagai ancaman non fisik yang tidak kalah destruktif seperti faham kontra nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal seperti liberalisme, individualisme, materialisme, radikalisme, komunisme, gaya hidup (*life style*) *western* yang hedon, membanjirnya produk import sebagai ancaman atas industri lokal dan UMKM, serta kerusakan lingkungan hidup dll., terjadi begitu natural sehingga kebanyakan generasi muda tidak menyadari. Konsekuensinya, kesadaran bela negara generasi muda juga lebih bersifat reaktif dan masih cenderung berorientasi pada ancaman fisik (militer).

Harmoni dan sinergi antar elemen pendidikan yang meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat belum sepenuhnya terbangun dengan baik, bahkan masing-masing elemen terindikasi berjalan sendiri-sendiri. Demikian juga para figur teladan terlebih pemimpin, belum menunjukkan konsistensi dalam menampilkan keteladanan. Kondisi ini menimbulkan disorientasi dan banyak generasi muda yang mengadopsi bahkan menduplikasi konten sikap-perilaku melalui internet.

Kontekstualisasi pemahaman secara berlanjut dan berkesinambungan melalui pendidikan menjadi elemen terpenting. Untuk itu di samping ancaman fisik (militer), materi faham kontra nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal, membanjirnya produk import, serta dampak kerusakan

lingkungan hidup sebagai ancaman atas eksistensi negara menjadi prioritas untuk dilakukan insersi sejak dini dalam pendidikan mulai dari lingkup keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kehadiran kebijakan yang relevan juga sangat urgen guna terus meningkatkan efektivitasnya.

Satu catatan, penelitian lapangan (field research) sebagai lanjutan perlu dilakukan guna mempertajam analisis penelitian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan atas diterbikannya naskah ini dalam Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia (Senastindo) 2021 kepada Gubernur Akademi Angkatan Udara dengan berbagai fasilitas dan kemudahan yang telah diberikan. Demikian juga kepada Koordinator Dosen dan Instruktur AAU atas kesempatan serta tiada henti memberikan motivasi, dan dorongan sehingga naskah ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Doni Koesoema, Pendidikan Karakter di Zaman Keblinger. Jakarta: Grasindo, 2009. H. 115
- [2] Saptono, Dimensi-Dimensi Pendidikan Karakter: Wawasan, Strategi, dan Langkah Praktis. Jakarta: Erlangga, 2011. H. 16
- [3] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- [4] Eksistensi NKRI” (Naskah Diklat Bela Negara di AAU). Akademi Angkatan Udara Yogyakarta.
- [5] Q. Y. Zakiyah and H. A. Rusdiana, Pendidikan Nilai, Kajian Teori dan Praktik di Sekolah, vol. 1. Bandung: Pustaka Setia, 2014. <http://digilib.uinsgd.ac.id/8789/1/Buku%20Pendidikan%20Nilai.pdf> hal. 62
- [6] D. K. Windrati, “Pendidikan Nilai sebagai Suatu Strategi dalam Pembentukan Kepribadian Siswa,” J. Form. J. Ilm. Pendidik. MIPA, vol. 1, no. 1, pp. 40–47, 2011.
- [7] R. Sukardi, “Pendidikan Nilai; Mengatasi Degradasi Moral Keluarga,” presented at the Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA, 2017. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnp/article/view/305-312>
- [8] Haryanto, “Pendidikan Karakter Menurut Ki Hadjar Dewantara,” Kurikulum dan Teknologi Pendidikan FIP UNY, Yogyakarta. <http://staffnew.uny.ac.id/penelitian/Pendidikan+Karakter+Menurut+Ki+Hajar+Dewantoro.pdf>
- [9] K. Amalia and D. Maulipaksi, “Tri Pusat Pendidikan: Guru, Keluarga dan Masyarakat,” Kemdikbud, Agustus 2017. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/08/tri-pusat-pendidikan-guru-keluarga-dan-masyarakat>
- [10] Wibowo, Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban, 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- [11] Fraenkel, Jack R. 1977. How to Teach about Values: An Analytical Approach, Englewood, NJ: Prentice Hall. 1-2
- [12] H. Wriggins, Y. Muhaimin, and C. Mc. Andrews., “Integrasi Bangsa,” in Masalah-Masalah Pembangunan Politik, Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1991.
- [13] J. Subianto, “Peran Keluarga, Sekolah, Dan Masyarakat Dalam Pembentukan Karakter Berkualitas,” Edukasia J. Penelit. Pendidik. Islam, vol. 8, no. 2, Art. no. 2, Sep. 2013, doi: 10.21043/edukasia.v8i2.757.
- [14] Asep Yadi Permana, “Pentingnya Pendidikan Karakter untuk Generasi Muda Di Era Globalisasi”, Jurnal Bintang.
- [15] Bambang Arianto, “Dampak Media Sosial Bagi Perubahan Perilaku Generasi Muda di Masa Pandemi Covid19” JSPG: Journal of Social Politics and Governance E-ISSN 2685-8096 | P-ISSN 2686-0279 Vol.3 No.2 Desember 2021 E-ISSN 2685-8096 | P-ISSN 2686-0279
- [16] Sardiman, 2010. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- [17] Nurhasanah, “Peran Masyarakat dalam Lembaga Pendidikan,” Fondatia J. Pendidik. Dasar, vol. 1, no. 1, pp. 61–67, Mar. 2007, doi: <https://doi.org/10.36088/fondatia.v1i1.87>.

-
- [18] Naisbit dan Aburdene. *Megatrends 2000: Sepuluh Arah Baru untuk Tahun 1990 –an cetakan ke-1*. Jakarta: Binarupa Aksara. Hal. 106
- [19] Y. Kusumawati, “Peran Ganda Perempuan Pemetik Teh,” vol. 4, no. 2, pp. 157–167, Sep. 2012.
- [20] Nurmila and R. Fadilah, “Analisis Perhatian Wanita Karir terhadap Keberhasilan Anak dalam Keluarga di Dusun sawagi Kecamatan Patallassang Kabupaten Gowa,” *J. Pendidik. Teknol. Pertan. Univ. Negeri Makassar*, vol. 3, pp. 223–227, 2017, doi: <https://doi.org/10.26858/jptp.v3i2.5711>.
- [21] Azra, 2006. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi* (cetakan kedua). Penerbit Kompas, Jakarta, hal. 172. https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/12972/1/T2_942014049_BAB%20I.pdf